

# **SKRIPSI**

**EVALUASI PROGRAM PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU  
DI KOTA MATARAM  
EVALUATING THE DEVELOPMENT OF GREEN OPEN SPACE  
PROGRAMS IN THE CITY OF MATARAM**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Program  
Strata Satu (S-1) Program Studi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram**



**OLEH :**

**RANO SAPUTRA  
NIM. 216110030**

**KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
2020**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

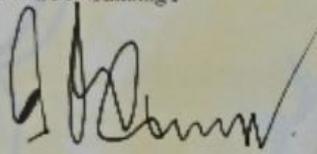
Skripsi ini ditujukan oleh pembimbing untuk diajukan ke panitia ujian

Skripsi Program Studi Administrasi Publik Pada

Hari : Sabtu

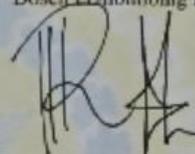
Tanggal : 15 Agustus 2020

Dosen Pembimbing I



(Drs. H. ABDURRAHMAN, MM)  
NIDN. 0804116101

Dosen Pembimbing II



(M. Taufik Rachman, SH, MH)  
NIDN. 0825078701

Mengetahui  
Program Studi Administrasi Publik

Ketua



(Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP.)  
NIDN. 0822048901

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**EVALUASI PROGRAM PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU DI  
KOTA MATARAM**

Oleh :

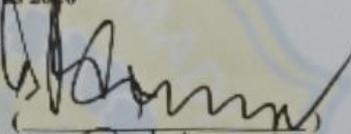
**RANO SAPUTRA**  
NIM. 216110030

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Sarjana Pada  
Jurusan Urusan Publik Telah disetujui Oleh Tim Penguji  
Pada tanggal seperti yang tertera di bawah ini.  
Mataram, 18 Agustus 2020

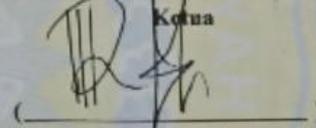
Tim Penguji

1. **Drs.H.ABDURRAHMAN,MM**  
NIDN. 0804116101

()

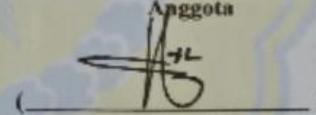
Ketua

2. **M.Taufik Rachman, SH, MH**  
NIDN. 0825078701

()

Anggota

3. **Drs. AMIL, MM**  
NIDN. 0831126204

()

Anggota

Mengetahui  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Dekan

  
(**Dr. H. Muhammad Ali, M.Si**)  
NIDN. 0806066801

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa :

Nama : Rano Saputra

Nim : 216110030

Memang benar skripsi yang berjudul Evaluasi Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Mataram adalah hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di tempat manapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing dan terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, memang diacu sebagai sumber dan dicantumkan kedalam daftar pustaka.

Jika dikemudian hari pernyataan saya terbukti tidak benar saya siap mempertanggung jawabkannya, termasuk bersedia meninggalkan gelar sarjana yang akan saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, 18 September 2020



Rano saputra

Nim. 216110030



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
**UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906  
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rano Saputra  
 NIM : 216110030  
 Tempat/Tgl Lahir : Piong 06-02-1998  
 Program Studi : ADM Publik  
 Fakultas : FISIPOL  
 No. Hp/Email : 082 339 766 540  
 Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Evaluasi Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota Mataram

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 9-9-2020

Penulis

  
Rano Saputra  
 NIM. 216110030

Mengetahui,  
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

  
Iskandar, S.Sos.,M.A.  
 NIDN. 0802048904

## **MOTO**

**Jangan Pergi Mengikuti Kemana Jalan Akan  
Berujung. Buat Jalan Mu Sendiri Dan Tinggalkan**

**Jejak**



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala kekuasaan dan karunia-Nyalah karya tulis ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan penuh rasa syukur, karya ini penulis persembahkan untuk:

- ❖ Ayah dan ibuku (Bapak Junaidin Ahmad dan Ibuk mulyani) sebagai ucapan terimakasih, hormat dan baktiku, karena sudah mendidik anakmu ini dengan kasih sayang dan penuh pengorbanan, sungguh karena do'a disetiap sujudmu anakmu ini dipermudah oleh Allah SWT dalam segala urusan, satu tetes keringat yang keluar dari tubuhmu tidak akan mampu unuk terbalaskan, semoga Allah SWT memberikan ibu dan ayah panjang umur, diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat-nya kelak.
- ❖ Kakak ku (Arina S.Pd) Yang selalu memberikan nasihat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Adik dan keponakanku (Rino Riska dan Inul) yang selalu memberikan kebahagiaan ketika pulang kerumah yang selalu menyambut ku dengan senyuman semoga menjadi anak yang salih dan sholihah
- ❖ Paman dan bibikku yang telah membantu dari segi materi maupun motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini
- ❖ Kepada pacar ku Bening Fadilah Saraswati yang telah banyak memberikan motifasi dan nasihat semongga Allah SWT selalu melindungi mu dan di mudahkan dalam menyelesaikan skripsi nya.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya. Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**Evaluasi Program Pengembang Ruang Terbuka Hijau Kota Matram**)” sesuai dengan harapan penulis.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, seorang manusia tauladan yang telah di utus oleh Allah SWT, untuk menyampaikan risalah islam keseluruh ummat manusia sebagai agama yang lurus.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan ini karena,tenaga,ilmu dan kemampuan penulis.sehingga keberhasilan dalam menyelesaikan penulis ini tidak terlepas dari semua pihak yang senantiasa ikhlas telah membantu memberikan bimbingan,dukungan,dorongan yang tidak perna henti.oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besar nya kepada dosen pembimbiing yang telah membantu untuk proses penyelesaian skripsi ini.

Segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besar nya kepda :

1. Bapak Drs. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Bapak Drs. H. Muhammad Ali ,M.SI ., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dedy Iswanto,S.T, M.M.,Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP., Ketua Program Studi Administrasi Publik yang telah memberikan kelancaran pelayanan dalam urusan Akademik
5. Bapak M. Taufik Rachman, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Publik Dan sekaligus dosen pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Drs.H.ABDURRAHMAN.MM Selaku Dosen pembimbing I yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Amil,MM., sebagai Penguji Anggota II. Yang telah memberikan banyak kritikan dan saran yang membangun bagi penulis
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
9. Seluruh staf dan karyawan Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

10. Keluarga besar Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kota Mataram atas izin penelitian dan dukungan dalam pembuatan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman seangkatan yang membuat perkuliahan lebih menyenangkan. Semua pihak disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Mohon atas segala kekurangan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga saran dan masukan yang sifat nya membangun dari semua pihak sangat kami hargai. Akhir kata penulis menaruh harapan besar semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak

Mataram, 7 Agustus 2020

Rano Saputra

# **Evaluasi Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Mataram**

**Rano Saputra<sup>1</sup> Drs. H. Abdurrahman, MM.<sup>2</sup>**

**M. Taufik Racman,SH.MH<sup>3</sup>**

**<sup>1</sup>Mahasiswa**

**<sup>2</sup>Pembimbing Utama**

**<sup>3</sup>Pembimbing Pendamping**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran hasil Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Mataram serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kota Mataram untuk meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Mataram. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hasil Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Di kota Mataram? dan Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Untuk Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Mataram?

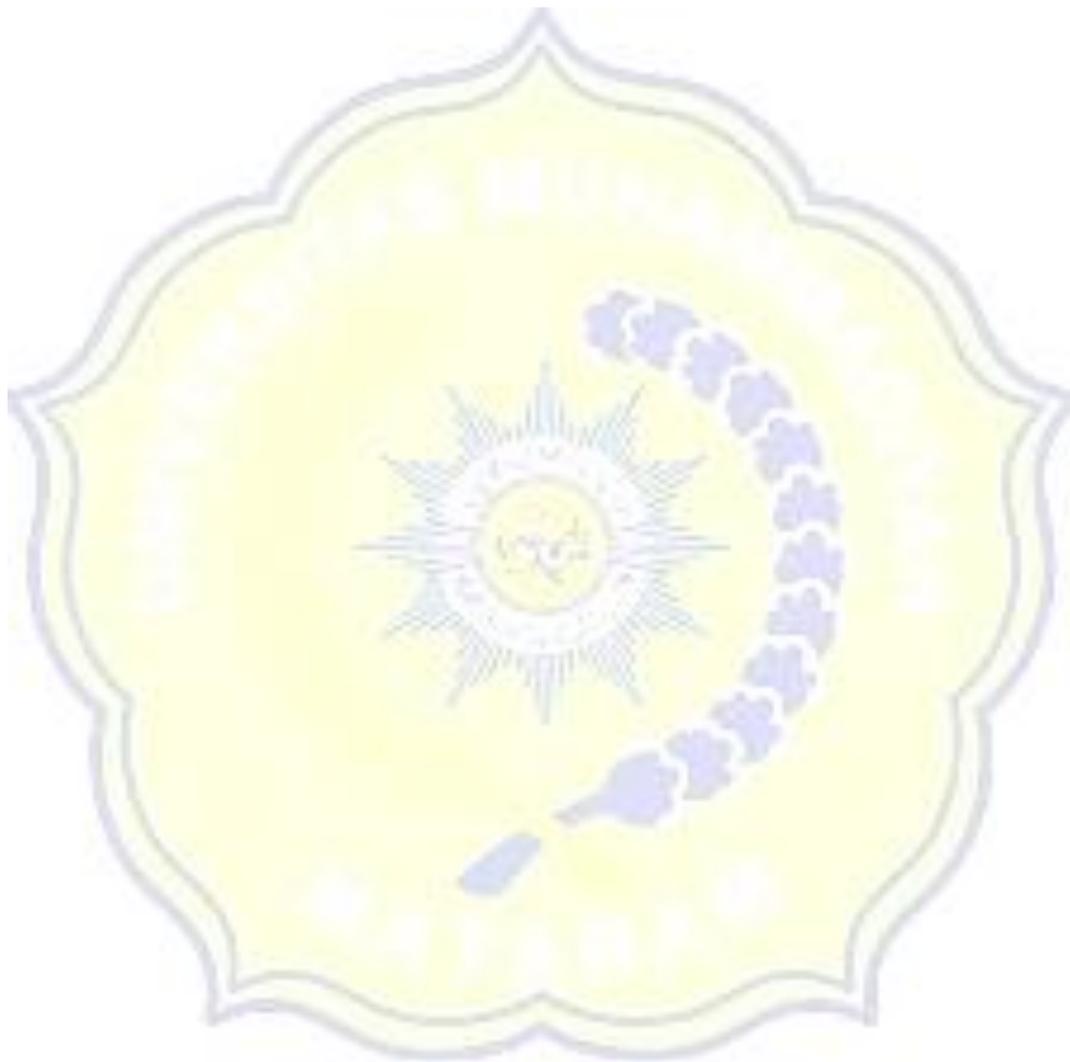
Penelitian ini merupakan penelitian dengan tipe deskriptif kualitatif. Fokus penelitian dalam penelitian ini meliputi evaluasi program pengembangan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Mataram terkait dari segi evaluasi program. Lokasi penelitian ini bertempat di Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kota Mataram, . Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber dari informan dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari tiga komponen berupa reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari pembahasan didapatkan berdasarkan fakta yang ada, pada indikator mengenai ketepatan, dapat dilihat bahwa masyarakat telah menikmati manfaat Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau walaupun masih banyak Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau yang belum terealisasi. Upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kota Mataram adalah melaksanakan agenda rapat koordinasi bulanan dan pelaporan ke Pemerintah Pusat di tiap tahunnya. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan RTH di Kota Mataram.

Adapun hal-hal yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau yaitu Agar suatu program berjalan dengan efektif hendaknya dinas Perumahan Dan Kawasan

Permukiman Kota Mataram lebih memfokuskan program nya kepada akar permasalahan yaitu terkait penyediaan lahan

**Kata kunci : evaluasi, program pengembangan ruang terbuka hijau di kota mataram**



## The Evaluation of Green Open Space Development Program in Mataram

**Rano Saputra, Drs. H. Abdurrahman, MM.,  
M. Taufik Racman, SH.MH**

1 Students  
2 First Advisor  
3 Second Advisor

### ABSTRACT

This study aimed to describe the results of the Green Open Space Development Program in Mataram and to determine the efforts made by the Mataram City Housing and Settlement Service to increase the Green Open Space (RTH) in Mataram. The formulation problems were, firstly, how the results of the Green Open Space Development Program in Mataram, and secondly, what was the Government's effort to intensify the Green Open Space Development Program in Mataram.

This research was descriptive qualitative. This research focused on the evaluation of the development program for green open spaces in Mataram in terms of evaluation programs. This research was located at the Department of Housing and Settlement Areas of Mataram. This study was in the form of primary and secondary data sources. The data sources included informants and documentation. The data analysis techniques used were data reduction, data display, and conclusion drawing.

The results of this study showed, on the indicator of accuracy, the community had enjoyed the benefits of the Green Open Space Development Program, even though there were still many Green Open Space Development Programs that needed not been realized. The attempt that had been carried out by the *Housing and Settlement Office of Mataram with organizing a monthly coordination meeting agenda and annual reporting to the Central Government*. It was one of the Government's efforts to increase the green open space in Mataram.

Furthermore, as for things that can be used for consideration in the implementation of the Green Open Space Development Program, so that the program runs effectively, the Housing and Settlement Office of Mataram should focus more on the root of problems, it was related to the land provision.

**Keywords: evaluation, green open space, development program**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>9</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>9</b>
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>10</b>
<b>BAB II PENDAHULUAN</b> .....	<b>11</b>
<b>A. Penelitian Terdahulu</b> .....	<b>11</b>
<b>B. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik</b> .....	<b>12</b>
<b>1. Penertian Kebijakan Publik</b> .....	<b>12</b>
<b>2. Tahap Kebijaan Publik</b> .....	<b>14</b>
<b>C. Tinjauan Tentang Evaluasi Kebjakan</b> .....	<b>18</b>
<b>1. Pengertian Evaluasi Kebijakan</b> .....	<b>18</b>
<b>2. Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan</b> .....	<b>20</b>
<b>3. Masalah Dalam Evaluasi Kebijakan</b> .....	<b>23</b>
<b>4. Tahap-Tahap Evauasi Kebjakan</b> .....	<b>27</b>
<b>5. Kriteria Evaluasi Kebijakan</b> .....	<b>29</b>
<b>6. Model Evaluasi</b> .....	<b>30</b>

7. Kriteria Keberhasilan Kebijakan .....	30
8. Konsep Evaluasi Kebijakan Program Pengembangan RTH Di Kota Mataram .....	31
D. Tinjauan Tentang Ruang Terbuka Hijau .....	33
1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau .....	33
2. Fungsi Ruang Terbuka Hijau .....	34
3. Tujuan Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau .....	37
4. Manfaat Ruang Terbuka Hijau .....	37
E. Tinjauan Tentang Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Mataram .....	38
F. Kerangka Berfikir .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	44
B. Fokus Penelitian .....	45
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	46
D. Subjek dan Informan Penelitian .....	46
E. Sumber Data Penelitian .....	47
F. Teknik Pengumpulan Data .....	48
G. Teknik Analisis Data .....	50
H. Keabsahan Data .....	51
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>55</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	55
B. Gambaran Umum Badan Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kota Matram .....	63
C. Deskripsi Data Hasil Penelitian .....	67
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>87</b>

## DAFTAR TABEL

01. Tabel Ruang Terbuka Hijau Kota Mataram Tahun 2007/2008 .....	6
02. Tipe-Tipe Evaluasi .....	22
03. Tinggi Rata-Rata Permukaan Laut dan Luas Daerah Mataram .....	57
04. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Dirinci Menurut Kecamatan di Kota Mataram .....	58
05. Luas dan Lokasi Taman Kota Mataram Tahun 2007/2008 .....	61
06. Ruang Terbuka Hijau Kota Mataram 2007 .....	62



## DAFTAR LAMPIRAN

01. Lampiran Data Lokasi dan Luasan Taman di Kota Mataram Tahun 2019
02. Lampiran RTH di Kota Mataram Median Jalan .....
03. Lampiran Kegiatan Rapat dengan Pemerintah Kota Mataram .....
04. Lampiran Dokumentasi wawancara .....



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan amanat dari UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang dimasyarakat luas RTH minimal sebesar 30% dari luas wilayah kawasan perkotaan yang dibagi menjadi RTH publik minimal 20% dan RTH Privat minimal 10%. Pada kenyataannya, terjadi penurunan kuantitas Ruang Terbuka Hijau yang sangat signifikan di kawasan perkotaan yang menyebabkan menurunnya kualitas ruang terbuka hijau di perkotaan. Ruang Terbuka Hijau Kota menjadi lebih terabaikan terutama bila kawasan kota sudah sangat semakin padat akan bangunan dan gedung-gedung.

Hal ini menyebabkan prosentase RTH di kawasan perkotaan semakin berkurang dari syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang penataan ruang, sehingga RTH sebagai pembentuk karakter kota seperti yang diutarakan oleh Simonds, yaitu RTH sebagai penjaga kualitas lingkungan, penyumbang ruang bernafas yang segar dan indah, paru-paru kota, penyangga sumber air bersih, pencegah erosi tidak terpenuhi, akibatnya suasana di perkotaan menjadi tidak nyaman seperti polusi udara yang semakin meningkat serta terjadinya banjir yang selalu menggenangi wilayah perkotaan di kala musim hujan.

Salah satu fungsi RTH yaitu sebagai pengendali iklim mikro, sarana menciptakan kesehatan, dan kehidupan lingkungan hidup. RTH juga berfungsi secara ekologis, menjamin keberlanjutan suatu wilayah kota secara fisik, dan merupakan satu bentuk RTH yang berlokasi, berukuran, dan berbentuk pasti dalam suatu wilayah kota, seperti RTH untuk perlindungan sumberdaya penyangga kehidupan manusia dan untuk membangun jejaring habitat kehidupan liar. RTH untuk fungsi-fungsi lainnya (sosial, ekonomi, arsitektural) merupakan RTH pendukung dan penambah nilai kualitas lingkungan dan budaya kota tersebut, sehingga dapat berlokasi dan berbentuk sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya, seperti untuk keindahan, rekreasi, dan pendukung arsitektur kota (Nugroho, 2006).

Ruang Terbuka Hijau kota, menurut Permen PU No.5 Tahun 2008, adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (open spaces) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi guna mendukung manfaat langsung atau tidak langsung yang dihasilkan oleh ruang terbuka hijau dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut. Adapun fungsi dari Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya dsingkat RTH, diantaranya :

- a) Fungsi ekologis; RTH diharapkan dapat memberi kontribusi dalam peningkatan kualitas air tanah, mencegah terjadinya banjir, mengurangi polusi udara, dan pendukung dalam pengaturan iklim mikro.

- b) Fungsi sosial budaya ; RTH diharapkan dapat berperan dalam terciptanya ruang untuk interaksi sosial, sarana rekreasi, dan sebagai penanda (tetenger/landmark) kawasan.
- c) Fungsi arsitektural/estetika; RTH diharapkan dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kawasan, melalui keberadaan taman, dan jalur hijau.
- d) Fungsi ekonomi; RTH diharapkan dapat berperan sebagai pengembangan sarana wisata hijau perkotaan, sehingga menarik minat masyarakat/wisatawan untuk berkunjung ke suatu kawasan, sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi.

Apabila dilihat dari fungsi-fungsi diatas , ruang terbuka sangatlah penting untuk sebuah perkotaan, karena dengan adanya Ruang Terbuka maka terciptalah kawasan perkotaan yang serasi dan seimbang dengan lingkungan sekitarnya. Namun pada kenyataannya, sekarang ini banyak lahan-lahan yang seharusnya berfungsi sebagai area hijau atau daerah yang berfungsi sebagai kawasan lindung yang bisa bermanfaat untuk masyarakat malah berubah dan dijadikan sebagai perumahan, pusat perbelanjaan dan bangunan-bangunan lainnya. Bangunan tersebut dapat merusak lingkungan yang ada disekitarnya, sehingga pada akhirnya pemerintah dan masyarakat juga yang akan terkena dampaknya.

Dalam hal ini, pemerintah terkesan seperti hanya memikirkan sarana dan prasarana fisik untuk kemajuan perekonomian di daerahnya semata tanpa memperhatikan fungsi-fungsi lainnya yang dapat

mendatangkan banyak manfaat untuk daerahnya seperti yang telah dijabarkan dalam fungsi Ruang Terbuka Hijau diatas. Aktualisasi dari fungsi ekologis, sosial budaya, ekonomi, dan arsitektural atau estetika dapat berupa Ruang Terbuka Hijau, yaitu dengan wujud fisik berupa taman kota. Akan tetapi apabila dilihat pada saat sekarang ini sudah jarang masyarakat yang mau mengunjungi taman kota untuk sekedar bersantai.

Maka dari itu, dibutuhkan perencanaan ruang berupa perencanaan umum dan perencanaan strategis. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW Nasional) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW Kota) merupakan sebuah perencanaan umum yang menjadi acuan bagi sebuah perkotaan untuk membuat penataan ruang di daerah/kotanya dan disusun lebih detail lagi di dalam rencana strategis berbentuk Rencana Detail Tata Ruang Kota dan RTR Kawasan Strategis Kota. Pemerintah kota dalam hal ini Walikota sebagai kepala daerah beserta para staf yang berkompeten di bidang tata kota harus memiliki visi yang jelas terhadap kemajuan sebuah perkotaan. Tidak hanya kemajuan dalam aspek perekonomian saja namun harus juga diiringi dengan perencanaan yang baik dari segi lingkungan, demi kepentingan masyarakat kota dan juga pelestarian lingkungan.

Salah satu daerah yang memiliki permasalahan terkait penyediaan RTH adalah kota Mataram sebagai salah satu kota yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki jumlah lahan seluas 6,130 Hektar yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 468.509 pada tahun 20117. Untuk itu Wali Kota Mataram mendorong terus penataan dan

pembangunann kota yang maju, religious, dan berbudaya. Selain itu juga dorongan intuk menciptakan Mataram Go Green ( Penghijauan ) juga kuat dengan adanya rancangan Ruang terbuka hijau yang secara konsisten akan dilakukan, namun sementara itu lahan haijau di Koata mataram semakin menipis.( jayajgok,11 November 2019)

Kota mataram hari ini kekurangan Ruang Terbuka Hijau yang di mana amanat Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Kota Mataram Tahun 2011-2031 Telah mewajibkan sebanyak 30% dari luas kota sebagai lahan RTH dimana 20% RTH yang bersifat publik dan 10% adalah RTH privat. Dikatakan bahwa sebuah perkotaan idealnya memiliki 30% sementara itu pemerintah kota mataram baru merealisasikan sebnyak 27% dari mandat Undang-Undang ( jayajgok,11 November 2019).

Luas RTH yang telah di tetapkan oleh pemkot mataram sebesar 1800 hektar dan telah terpenuhi sebesar 1600 hektar tinggal sisa 200 hektar untuk memenuhi kewajiban dari RTH yang telah di tentukan. Salah satu nya RTH yang memanjang di kawasan Ampenan telah di gunakan sebesar 9,7 hektar untuk pembangunan PLTGU Lombok peaker dan telah di janjikan akan di gantikan dengan lahan yang asama di tempat lain. (radar Lombok.co.id 1 juli 2019). Lahan pekerjaan menjadi persoalan wajib yang harus di selesaikan bersama dengan adanya ketersediaan lapangan kerja,arti nya setiap kebijakan dalam menjawab solusi lapanga keja haruslah tidak melanggar kebijakan yang lainnya.

**Tabel 1.1 Ruang Terbuka Hijau Kota Mataram Tahun 2019**

No	Lokasi	Ukuran		
		Lebar	Panjang	Luas
1	Taman Sukaraja Ampenan	23	188.2	4,328.60
2	Taman Kali Jangkuk Ampenan	13.3	64.4	856.52
3	Taman Sekarbela	2.5	110.9	277.25
5	Taman perumnas	49	49	2,401.00
6	Taman Prapatan Ds. Cermen	8.86	24.3	215.30
7	Taman Prapatan Sweta	8.9	33.6	299.04
8	Taman damija Jln bung Karno	5	12.5	62.50
9	Taman Lapangan Sekarbela	4.5	72	324.00
10	Taman Simpang Empat Bank Indonesia	4	232.1	928.40
11	Taman Selaparang (samping Bundaran Selaparang)	2	9	18.00
12	Taman Jembatan Gantung Utara-Barat	4.6	14.5	66.70
13	Taman Jembatan Gantung Utara-Timur	3.36	14.5	48.72
14	Taman Jembatan Gantung Selatan	7.6	12.5	95.00
15	Taman Burung Walet	2	25	50.00
16	Taman Lingkungan BTN Kekalik (Jl.Serayu)	21.7	41.7	904.89
17	Taman Tanah Tag-tagan Pagutan	4	50	200.00

18	Taman Muara Jangkuk			5,000.00
19	Taman Lingkungan Kekalik Jaya			300.00
20	Taman Lingkungan BTN Taman Baru			1,500.00
21	Taman Lingkungan Seganteng Cakra Selatan			138.90
22	Taman Abian Tubuh Baru			5,000.00
23	Taman Pagutan Timur			80,000.00
24	Rumija Terusan Jl. Bung Hatta	1.5	400	600.00
25	Taman Lingkungan Dasan Sari	1	25	25.00
26	Taman Kerbau	20	40	800.00
27	Taman Sisi Utara Pertokoan Shopping Centre	1.5	52	78.00
28	Taman Bundaran Jl. Gajah Mada			460.00
29	Taman Rumija Terusan Jl. Bung Hatta	1.5	600	900.00
30	Taman Depan BPK Udayana	1.5	38	57.00
31	Taman Jl. Lingkar Islamic Centre (Samping SDN 5 Mataram)			66.00
32	Taman Rumija Gang Langko (Utara Islamic Centre Arah Pasar Dasan Agung)			100.00
33	Taman Tematik Lingkungan Kamasan			400.00
34	Taman Malomba Sisi Selatan	2.6	41	106.60

35	Taman MCC Pagesangan			72.00
36	Taman Batas Kota Sisi Utara ( Meninting )			500.00
37	Taman Kompleks BTN Taman Indah (Barat)			100.00
38	Taman Kompleks BTN Taman Indah (Timur)			230.00
39	Taman Pertigaan Bertais			120.00
40	Taman di Jalan Durgantini Seganteng			20.00
41	Taman Pojok Sisi Utara Sebelah Barat SMPN 15 Mataram	2.65	22	58.30
42	Taman Rumija Sisi Barat SMAN 5 Mataram	4.5	58	261.00
43	Taman Batas Kota Sisi Selatan (Dasan Cermen)			15.00
44	Taman Lingkungan BTN Taman Baru Sisi Timur	4.8	46.5	223.20
45	Taman PKK Kota Mataram	5.5	63	346.50
46	Taman Dirgantara	5.4	19.4	104.76
47	Taman Perempatan Gebang	16	3.5	56.00
48	Taman Lingkungan Sapta Marga	22	20	440.00
49	Taman Karang Genteng	20	10	200.00
50	Taman Lingkungan Babakan	12	5	60.00
51	Taman Plaza Tanjung Karang Permai	31	18	558.00

52	Taman RTH Seganteng	98	58	5,684.00
----	---------------------	----	----	----------

*Sumber Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram Tahun 2019*

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **EVALUASI PORGRAM PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MATARAM.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hasil Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Mataram?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah untuk program pengembangan Ruang Terbuka hijau di Kota Mataram?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hasil program pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Mataram.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah untuk program pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Mataram.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut :

##### **1. Aspek Teoritis**

Penelitian ini mampu memberikan masukan dan kontribusi pemikiran bagi perkembangan Ilmu Administrasi Negara terutama mengenai evaluasi suatu program atau kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam skripsi ini peneliti berfokus pada Evaluasi Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Mataram.

##### **2. Aspek Praktis**

Penelitian ini memberikan masukan kepada Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kota Mataram dalam mewujudkan ruang terbuka hijau yang memadai di Kota Mataram agar terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman bagi masyarakat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

1. Fungsi Taman Metro Sebagai Ruang terbuka publik Tahun 2012 yang di teliti oleh Ova Andrahan, tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui fungsi social budaya, seperti terdapat unsur tempat duduk, tempat berkumpul dan keadaan yang nyaman untuk mengetahui fungsi estetika, seperti terdapat unsur keindahan kebersihan, dan kenyamanan dan menarik, mengunaka menggunakan metode penelitian deskriptif dengan Teknik pengumpulan data berupa observasi lapangan, studi dokumentasi, studi literatur dan wawancara terstruktur. Hasil yang di dapat pada penelitian ini yaitu Taman Kota Metro memiliki fungsi sosial
2. Evaluasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Di kota makasar Tahun 2017 yang di teliti oleh Nopiayanti tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dampak dari kebijakan-kebijakan ruang terbuka hijau di kota makasar. Penelitian menggunakan metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif penelitian tentang data yang di kumpulkan adan di nyatakan dalam bentuk kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya hasil wawancara antar peneliti dengan informan.
3. Analisis Peneglolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bau-Bau Tahun 2017 yang di teliti oleh Muhammad Fahril Masruddin. Tujuan dari

penelitian ini bagaimanakah pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Bau-Bau Penelitian menggunakan metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif penelitian tentang data yang di kumpulkan akan di nyatakan dalam bentuk kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya hasil wawancara antar peneliti dengan informan.

## **B. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik**

### **1. Pengertian Kebijakan Publik**

Menurut Islamy dalam Sulistio (2012:3) menyatakan bahwa Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah merupakan bentuk kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan oleh institusi publik (instansi atau badan-badan pemerintah) bersama-sama dengan aktor-aktor elit politik dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan publik demi kepentingan seluruh masyarakat. Ruang lingkup studi kebijakan publik adalah :

- a) Penyusunan agenda kebijakan
- b) Formulasi kebijakan
- c) Adopsi kebijakan
- d) Implementasi kebijakan

e) Evaluasi kebijakan

f) Anjuran kebijakan dan rekomendasi kebijakan

Dunn dalam Pasolong (2007:39) menyatakan bahwa Kebijakan publik merupakan suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang yang menyangkut tugas pemerintah.

Eyestone dalam Winarno, (2012:19) menyatakan bahwa Secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Konsep yang ditawarkan Eyestone ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Friedrich dalam Winarno (2012:20) mendefinisikan kebijakan publik sebagai perangkat tindakan yang dilakukan pemerintah dengan mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan adanya hambatan-hambatan sehingga mencapai sasaran dan tujuan yang telah diinginkan.

Pendapat lain juga dikatakan oleh ahli lainnya, Dye dalam Agustino (2008:7) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau yang tidak dikerjakan. Sedangkan Anderson dalam Winarno (2012:19)

merumuskan kebijakan publik sebagai kegiatan-kegiatan pemerintah yang dimaksudkan untuk mengatasi satu masalah.

Dari beberapa pendapat ahli di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan oleh institusi publik (instansi atau badan-badan pemerintah) bersamasama dengan aktor-aktor elit politik dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan publik demi kepentingan seluruh masyarakat.

## **2. Tahapan Kebijakan Publik**

Meskipun ada fakta bahwa seringkali muncul kekecewaan terhadap kerangka analisis kebijakan yang dominan, yakni analisis pengambilan keputusan rasional, namun pendekatan tahapan (*stagist*) atau siklus tetap menjadi basis untuk analisis proses kebijakan dan analisis didalam untuk proses kebijakan yang akan datang. Laswell dalam Parsons (2005:8) berpendapat tahapan proses kebijakan terdiri dari: Inteligensi, Promosi, Preskripsi, Invokasi (*invocation*), Aplikasi, Penghentian (*termination*) dan penilaian (*appraisal*)

Selain itu ada pula pendapat Anderson dalam Santoso (2008:36) mengemukakan bahwa terdapat lima tahapan-tahapan kebijakan, yaitu :

- a) Formasi masalah
- b) Formulasi
- c) Adaptasi

d) Implementasi

e) Evaluasi

Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan beberapa *variable* yang harus dikaji. Beberapa ahli mengkaji kebijakan publik dan membaginya dalam proses-proses penyusunan kebijakan ke dalam beberapa tahap dengan tujuan untuk mempermudah dalam mengkaji kebijakan publik. Melihat pendapat beberapa ahli tentang tahapan-tahapan kebijakan dengan urutan yang berbeda.

Dunn dalam Winarno (2012:31) memiliki pendapat tentang tahapan-tahapan kebijakan publik sebagai berikut :



Gambar 2.1 Tahapan-Tahapan kebijakan Pablik

Sumber : *Dunn dalam Winarno (2012:31)*

a) Tahapan Penyusunan Agenda

Menurut Dunn dalam Winarno (2012:30) penyusunan agenda adalah Pejabatpejabat yang duduk dalam pemerintahan akan menempatkan masalah-masalah yang akan dijadikan dalam agenda publik. Sebelum menetapkan masalahmasalah yang akan masuk

dalam agenda publik, masalah-masalah yang ada di publik akan berkompetisi terlebih dahulu sehingga akhirnya nanti akan ada beberapa masalah yang masuk dalam agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap agenda ini ada masalah yang tidak disentuh sama sekali, ada pula masalah yang dijadikan fokus dalam agenda serta terdapat pula masalah yang akan ditunda untuk waktu yang lama karena alasan-alasan tertentu.

b) Tahap Formulasi Kebijakan

Menurut Dunn dalam Winarno (2012:31) tahap formulasi kebijakan adalah Masalah yang telah masuk dalam agenda kebijakan kemudian akan dibahas oleh para pembuat kebijakan, masalah tersebut kemudian akan dicari bentuk-bentuk cara untuk penyelesaiannya. Pemecahan masalah tersebut berasal dari alternatif-alternatif (*policy alternative*) yang ada. Penyeleksian alternatif-alternatif tersebut sama halnya dengan menetapkan masalah yang ditetapkan sebagai agenda publik yaitu beberapa alternatif bersaing untuk bisa diambil dan ditetapkan sebagai penyelesaian dari permasalahan. Pada tahapan formulasi ini para aktor memainkan perannya untuk mengusulkan pemecahan masalah yang terbaik.

c) Tahap Adopsi Kebijakan

Menurut Dunn dalam Winarno (2012:31) tahap adopsi kebijakan adalah Alternatif-alternatif yang ditawarkan para perumus

kebijakan tentu banyak dan dari sekian banyak alternatif yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, hanya salah satu yang dipilih dan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, consensus antara pimpinan atau keputusan peradilan.

d) Tahap Implementasi Kebijakan

Menurut Dunn dalam Winarno (2012:31-32) tahap implementasi kebijakan adalah Suatu program kebijakan hanya akan menjadi dokumen serta arsiparsip yang tertata rapi jika kebijakan tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, kebijakan tersebut harus diimplementasikan, yaitu dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah sampai pada tingkat bawah sehingga diharapkan kebijakan yang sudah terbentuk tidak sia-sia dan berjalan dengan baik. Pada tahap implementasi berbagai kepentingan akan bersaing yang pada nantinya akan bermunculan para pelaksana yang mendukung kebijakan tersebut dan para pelaksana yang menolak dengan kebijakan tersebut.

e) Tahap Evaluasi Kebijakan

Menurut Dunn dalam Winarno (2012:32) tahap evaluasi kebijakan adalah Tahap evaluasi ini kebijakan yang telah diimplementasikan akan dinilai tingkat keberhasilannya untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut memberikan dampak yang baik terutama untuk mengatasi masalah publik. Ketika pada tahap ini

akan ditetapkan ukuran atau indikator-indikator yang menjadi alat untuk mengukur suatu kebijakan apakah berhasil atau gagal.

Beberapa tahap-tahap kebijakan di atas bisa disimpulkan bahwa tahap-tahap kebijakan merupakan suatu proses terbentuknya suatu kebijakan dimana pada setiap tahapan satu dengan yang lainnya sangat berkaitan. Untuk penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada proses evaluasi kebijakan.

## **C. Tinjauan Tentang Evaluasi Kebijakan**

### **1. Pengertian Evaluasi Kebijakan**

Setiap kebijakan pemerintah selalu menghasilkan dampak yang diharapkan, yang menguntungkan maupun yang merugikan. Semua jenis dampak itu menjadi subyek dari studi evaluasi. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan.

Menurut Anderson dalam Winarno (2008:166) menyatakan bahwa Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Lester dan Stewart dalam Winarno (2008:166), evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda: Tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-

konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (*outcome*) atau dampak (*impact*) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil di masa yang akan datang.

Menurut Dunn dalam Nugroho (2011:670) mendefinisikan bahwa: “Evaluasi kebijakan sebagai pemberi informasi mengenai nilai, manfaat dari suatu hasil kebijakan yang bisa dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik; evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target; dan evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Beberapa pendapat dari para ahli tersebut peneliti menyimpulkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang fungsional karena evaluasi kebijakan dilakukan bukan hanya pada titik penetapan dan implementasi suatu kebijakan, akan tetapi evaluasi kebijakan harus dilakukan sepanjang proses kebijakan itu sendiri.

## 2. Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan

Menurut James Anderson dalam Winarno (2012 :243) terdapat tiga tipe evaluasi kebijakan dimana tipe-tipe tersebut masing-masing didasarkan pada pemahaman evaluator terhadap evaluasi. Tipe-tipe tersebut adalah :

- a. Tipe pertama, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional.
- b. Tipe kedua, evaluasi memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program tersebut
- c. Tipe tiga, tipe evaluasi kebijakan sistematis.

Ketiga tipe tersebut merupakan tipe-tipe evaluasi. Kemudian pada setiap tipe tersebut masing-masing tipe memiliki konsekuensi serta fokus apa yang akan menjadi kajian dalam evaluasi suatu kebijakan.

Selain itu pendapat lainnya juga muncul dari para ahli lainnya, menurut Dunn dalam Nugroho (2011:2887) evaluasi terdiri :

- a. Efektivitas, berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produktif atau layanan atau nilai moneterinya.
- b. Efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang dikehendaki. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah merupakan

hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dengan ongkos moneter.

- c. Kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan kuatnya hubungan antar alternatif kebijakan dengan hasil yang diharapkan.
- d. Perataan, erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan merujuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan atau pelayanan pendidikan kadang-kadang didistribusikan atas dasar kriteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat hubungan dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan sumber masyarakat.
- e. Responsivitas, berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan

semua kriteria lainnya efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

- f. Ketepatan, kriteria ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas, substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersamasama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga diri tujuan program atau kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tertentu.

**Tabel 2.1 Tipe-Tipe Evaluasi**

<b>Tipe Kriteria</b>	<b>Pertanyaan</b>
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
Perataan	Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata pada kelompok-kelompok yang berbeda?
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
Ketepatan	Apakah hasil yang diinginkan berguna atau bernilai?

*Sumber : Dunn dalam Nugroho (2011:671)*

Dari pendapat para ahli peneliti lebih tertarik pada tipe evaluasi Dunn, yang menilai evaluasi dari segi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Pada penelitian ini dari karakteristik evaluasi Dunn peneliti mengambil 6 (enam) karakteristik evaluasi yang dianggap cocok digunakan dalam penelitian program Ruang Terbuka Hijau di Kota Mataram.

Peneliti menggunakan 6 kriteria tersebut karena pada efektivitas peneliti ingin meneliti keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan masyarakat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, pada efisiensi peneliti ingin melihat usaha yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan, pada aspek kecukupan peneliti ingin melihat seberapa besar pencapaian hasil yang diinginkan dalam memecahkan masalah, pada aspek pemerataan peneliti ingin melihat biaya yang digunakan dapat dikelola dengan baik dalam menjalankan program ini, lalu pada aspek responsivitas peneliti ingin melihat hasil dari kebijakan ini dapat memuaskan kebutuhan atau nilai disetiap kelompok dan yang terakhir aspek ketepatan peneliti ingin melihat hasil yang didapatkan ini dapat berguna atau bernilai baik disetiap kelompok atau masyarakat.

### **3. Masalah Dalam Evaluasi Kebijakan**

Untuk menilai suatu kebijakan berhasil ataupun gagal, maka diperlukan tahapantahapan untuk mengevaluasi suatu kebijakan. Evaluasi merupakan proses yang rumit dan kompleks, karena memang

dalam evaluasi melibatkan berbagai macam kepentingan individu-individu. Namun dalam proses evaluasi suatu kebijakan tentunya ada beberapa masalah-masalah yang dihadapi oleh peneliti.

Hogwood dan Gunn dalam Winarno (2012:245) mengidentifikasi beberapa masalah berat yang menjadi kendala dalam evaluasi kebijakan publik atau program. Masalah-masalah tersebut sebagai berikut :

a. Tujuan-tujuan kebijakan

Jika tujuan kebijakan tidak jelas atau dengan kata lain tujuan tersebut tidak dapat diukur dengan tidak adanya kriteria yang jelas untuk menentukan keberhasilan suatu kebijakan maka tujuan akan terlihat samar-samar. Kekaburan dalam tujuan kadangkala merupakan konsekuensi dari perbedaan-perbedaan titik pandangan mengenai tujuan-tujuan kebijakan.

b. Membatasi kriteria untuk keberhasilan

Bahkan pada saat tujuan kebijakan secara jelas menyatakan ada masalah tentang bagaimana keberhasilan tujuan itu akan diukur. Maka tujuan tersebut akan berubah dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

c. Efek samping

Dampak-dampak yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan ataupun program seringkali mempengaruhi evaluasi kebijakan tersebut. Kesulitan yang biasanya muncul pada saat orang mencoba

untuk mengidentifikasi dan mengukur efek/efek/pengaruh sampingan dan memisahkan efek tersebut dari kebijakan atau program yang sedang dievaluasi. Terdapat masalah-masalah tentang faktor-faktor yang merugikan maupun faktor-faktor yang menguntungkan serta seberapa besar faktor ini dipertimbangkan secara relatif dengan tujuan-tujuan pokok kebijakan.

d. Masalah Data

Informasi yang diperlukan untuk menilai dampak yang ditimbulkan dari suatu kebijakan atau program tidak tersedia atau mungkin saja tersedia namun dalam bentuk yang tidak cocok.

e. Masalah Metodologi

Masalah yang seperti ini umum untuk masalah tunggal, atau suatu kelompok penduduk, menjadi target dari beberapa program dengan tujuan yang sama atau saling berkaitan.

f. Masalah Politik

Evaluasi bisa menimbulkan ancaman bagi beberapa orang. Keberhasilan maupun kegagalan suatu kebijakan atau program di mana politisi atau para birokrat memiliki komitmen terhadap karier secara pribadi, dan dari mana kelompok-kelompok klien menerima keuntungan yang sedang dievaluasi. Pertimbangan-pertimbangan ini jelas akan memengaruhi bagaimana hasil evaluasi bisa dijalankan, sebagai bentuk kerjasama para pejabat publik dan klien.

g. Biaya

Ini bukan tidak umum untuk evaluasi suatu program terhadap biaya sebesar satu persen dari total biaya program biaya seperti ini merupakan pengalihan dari pemberian kebijakan atau program.

Anderson dalam Winarno (2012:248) menyatakan setidaknya ada delapan faktor yang menyebabkan kebijakan-kebijakan tidak memperoleh dampak yang diinginkan yakni :

- a. Sumber-sumber yang tidak memadai
- b. Cara yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan
- c. Masalah publik seringkali disebabkan karena banyak faktor sementara kebijakan yang ada ditujukan hanya kepada penanggulangan atau beberapa masalah saja.
- d. Cara orang menanggapi atau menyesuaikan diri terhadap kebijakan-kebijakan publik yang justru meniadakan dampak kebijakan yang diinginkan.
- e. Tinjauan kebijakan tidak sebanding dan bertentangan satu sama lain
- f. Biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan masalah membutuhkan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan masalah tersebut
- g. Banyak masalah publik yang tidak mungkin dapat diselesaikan.
- h. Menyangkut sifat masalah yang akan dipecahkan oleh suatu tindakan kebijaka

#### 4. Tahap-tahap Evaluasi Kebijakan

Setelah mengetahui masalah-masalah yang akan dihadapi di harapkan peneliti dapat melakukan tahapan-tahapan evaluasi. Menurut Dunn dalam Santosa, (2008: 44) ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam evaluasi kebijakan antara lain yaitu :

- a. Spesifikasi program kebijakan
- b. Apakah kegiatan-kegiatan dan sasaran yang melandasi program
- c. Koleksi informasi kebijakan
- d. Modeling program kebijakan
- e. Penaksiran evaluabilitas program kebijakan
- f. Umpan balik penaksiran evaluabilitas untuk pemakaian

Selain itu pendapat lain tentang langkah-langkah evaluasi kebijakan juga di lontarkan oleh beberapa ahli salah satu nya Edward A. Suchman Suchman dalam Winarno (2012:233) mengemukakan ada enam langkah dalam evaluasi kebijakan yakni :

- a. Mengiden tifikasi tujuan program yang akan di evaluasi
- b. Analisis terhadap masalah
- c. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
- d. Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi
- e. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain
- f. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Tahap-tahap evaluasi kebijakan Suchman dalam Winarno (2012:233) juga mengidentifikasi beberapa pertanyaan.

- a. Apakah yang menjadi isi tujuan program ?
- b. Siapa yang menjadi target program ?
- c. Kapan perubahan yang diharapkan terjadi ?
- d. Apakah tujuan yang ditetapkan satu atau banyak ?
- e. Apakah dampak yang diharapkan besar ?
- f. Bagaimana tujuan tersebut divapai ?

Melihat beberapa tahapan yang ada, yang paling terpenting dalam evaluasi kebijakan adalah mendefinisikan masalah. Sebab dengan mengidentifikasikan masalah-masalah maka tujuan-tujuan dalam evaluasi dapat disusun dengan jelas dan jika mengidentifikasikan masalah gagal maka tujuan yang terjadi adalah kegagalan dalam memutuskan tujuan-tujuan segala bentuk proses evaluasi kebijakan peneliti harus memiliki penilaian standar untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan suatu efektifitas sebuah kebijakan pemerintah. Pada intinya yang dinilai dari sebuah proses evaluasi terhadap kebijakan yang telah dijalankan adalah isi kebijakan, implementasi maupun dampaknya.

Pada program pengembangan RTH tahap-tahap yang digunakan yaitu :

- a. Mengidentifikasi program perkembangan RTH
- b. Mendeskripsikan SOP program pengembangan RTH

- c. Menganalisis masalah dan kendala yang terjadi pada pelaksanaan program pengembangan RTH
- d. Mengukur pencapaian hasil dengan target yang telah ditetapkan program pengembangan RTH.

## 5. Kriteria Evaluasi Kebijakan

Menurut Suharto (2008:40) evaluasi kebijakan pada dasarnya: “Merupakan alat untuk mengumpulkan dan mengelola informasi mengenai program atau pelayanan yang diterapkan. Evaluasi kebijakan menyediakan data dan informasi yang bias dipergunakan untuk menganalisis kebijakan dan menunjukkan rekomendasi-rekomendasi bagi perbaikan-perbaikan yang diperlukan agar implementasi kebijakan berjalan efektif sesuai dengan kriteria yang diterapkan. Kriteria evaluasi biasanya dirumuskan berdasarkan indicator-indikator sebagai berikut:

- a. Indicator masukan (*input indicators*) bahan-bahan dan sumber daya yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan
- b. Indicator proses (*procces indicators*) cara-cara dengan mana bahan-bahan dan sumber daya diolah atau ditransformasikan menjadi penyedia pelayanan
- c. Indicator keluaran (*output indicators*) barang-barang atau pelayanan-pelayan yang diproduksi oleh suatu program
- d. Indicator dampak (*out comen indikators*) hasil atau akibat yang ditimbulkan suau program.

## **6. Model Evaluasi**

Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Untuk itu evaluasi memiliki beberapa model yang dapat di gunakan.

Menurut Lester dan Steward dalam Nugroho (2011:676), mengelompokkan evaluasi menjadi empat bagian yaitu :

1. Evaluasi proses, evaluasi yang berkenaan dengan proses implementasi,
2. Evaluasi dampak, evaluasi berkenaan dengan hasil atau pengaruh implementasi kebijakan,
3. Evaluasi kebijakan, evaluasi yang menguji apakah terdapat kesesuaian antara hasil dan tujuan,
4. Evaluasi meta-evaluasi, evaluasi berbagai implementasi kebijakan yang ada untuk menemukan kesamaan-kesamaan tertentu.

## **7. Kriteria Keberhasilan Kebijakan**

Kriteria keberhasilan kebijakan atau program dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain :

- a. Cara pelaksanaan
- b. Agenda pelaksanaan

c. Kelompok sasaran

d. Manfaat program

Sedangkan pada perspektif hasil, program atau kebijakan dapat dinilai berhasil manakala program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja dikatakan berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan dan suatu program dapat dikatakan gagal dari sudut proses, namun berhasil jika ditinjau dari dampak yang dihasilkan.

Adanya teori kriteria keberhasilan kebijakan sangat membantu peneliti dalam menetapkan kriteria keberhasilan program Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dengan adanya kriteria keberhasilan program, maka peneliti mengetahui hal-hal penting apa saja yang akan menjadi fokus penelitian. kriteria keberhasilan program RTH antara lain :

- a. Cara pelaksanaan sesuai SOP yang telah ditetapkan
- b. Para stakeholder dan sumberdaya lainnya sesuai dengan SOP
- c. Target sasaran sesuai dengan SOP
- d. Adanya manfaat program bagi pelaksanaan program
- e. Tercapainya hasil serta dampak yang diinginkan setelah pelaksanaan program

## **8. Konsep Evaluasi Kebijakan Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Mataram**

Dunn dalam Nugroho (2011:670) mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai : “Pemberi informasi mengenai nilai, manfaat dari

suatu hasil kebijakan yang bisa dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik; evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target; dan evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah dalam rekomendasi. Konsep evaluasi proses itu terdiri dari meliputi :

- a. Evaluasi input : bahan-bahan dan sumberdaya yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan;
- b. Evaluasi proses : cara-cara dengan mana bahan-bahan dan sumberdaya diolah atau ditransformasikan menjadi penyedia pelayanan;
- c. Evaluasi output : barangbarang atau pelayanan-pelayanan yang diproduksi oleh suatu program.
- d. Evaluasi dampak : hasil atau akibat yang ditimbulkan oleh suatu program.

Evaluasi kebijakan RTH ini akan difokuskan pada evaluasi proses atau evaluasi pelaksanaan RTH Evaluasi proses terhadap kebijakan ini akan ditekankan pada sejauh mana kebijakan atau program tersebut menjangapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam mengevaluasi proses atau implementasi kebijakan RTH maka dapat digunakan tipe evaluasi menurut Dunn dalam Nugroho (2011 : 729) terdiri dari : 1. Efektivitas,

2. Efisiensi, 3. Kecukupan, 4. perataan, 5. Responsifitas, dan 6. Ketepatan

#### **D. Tinjauan Tentang Ruang Terbuka Hijau**

##### **1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

Pada penataan ruang mendefinisikan ruang sebagai wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara. Ruang sebagai salah satu sumberdaya alam tidaklah mengenal batas wilayah. Ruang terbuka sebagai salah satu unsur kota yang sangat penting di lihat dari fungsi ekologis. Undang-Undang Perencanaan Ruang (UUPR) pasal 1 butir 31, menyatakan ruang terbuka hijau adalah memanjang atau jalur dan mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam.

Ruang terbuka hijau Menurut Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 tahun 2011 adalah RTH merupakan area memanjang, jalur dan mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Menurut Purnomohadi dalam Wibowo (2009:33), RTH adalah suatu lapangan yang ditumbuhi berbagai tumbuhan, pada berbagai strata, mulai dari penutup tanah, semak, perdu dan pohon.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa ruang terbuka hijau adalah ruang yang berfungsi sebagai wadah untuk makhluk hidup ataupun manusia dalam melakukan kegiatan serta

sebagai tempat yang nyaman untuk makhluk hidup berkembang biak agar dapat tumbuh secara berkelanjutan.

## **2. Fungsi Pokok Ruang Terbuka Hijau**

Menurut Hasni (2010:230) menyatakan bahwa : “Pelaksanaan pengembangan Ruang Terbuka Hijau dilakukan dengan pengisian hijau tumbuhan secara alami ataupun dengan tanaman budi daya, seperti tanaman komoditas usaha pertanian yang dalam hal ini penekanan pada nilai produktivitasnya, termasuk perkebunan, perhutanan / hutan kota, maupun peternakan dan usaha perikanan, hijau pertamanan dan olahraga biasanya lebih ditekankan pada nilai kreatifnya baik pasif maupun aktif, serta keindahannya dan seterusnya.

Ditinjau dari kondisi ekosistem pada umumnya, apapun sebutan bagian-bagian Ruang Terbuka Hijau kota tersebut, hendaknya semua selalu mengandung tiga fungsi pokok ruang terbuka hijau yaitu :

- a. Fisik ekologis (termasuk perkaya jenis dan plasmanulfahnya)
  - b. Ekonomis (nilai produktifnya/finansial dan penyeimbang untuk kesehatan lingkungan)
  - c. Social budaya (termasuk pendidikan nilai budaya dan psikologi)
- fungsi RTH dalam peraturan Menteri No.5 Tahun 2008 yaitu :

a) Fungsi utama (instrinsik) yaitu fungsi ekologis :

- 1) Memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari system silkulasi udara atau paru-paru kota

- 2) Pengaturan iklim mikro agar system sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar
- 3) Sebagai peneduh
- 4) Produsen oksigen
- 5) Penyerap air
- 6) Penyedia habitat satwa
- 7) Penyerap polutan media udara, air, dan tanah serta penahan air.

b) Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu ;

1) Fungsi social dan budaya

- i. Menggambarkan ekspresi budaya local
- ii. Merupakan media komunikasi warga kota
- iii. Tempat rekreasi
- iv. Wadah dan objel pendidik, peneliti, dan pelatihan dalam mempelajari alam

2) Fungsi estetika

- i. Meningkatkan kenyamanan memperindah lingkungan kota baik dari sekala mikro : halaman rumah, lingkungan, pemukiman, maupun mikro :lenskip kota secara keseluruhan
- ii. Menstimulasi kreatifitas dan produktifitas warga kota
- iii. Pembentukan factor keindahan arsitektural

iv. Menciptakan Susana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun

3) Fungsi RTH adalah :

- i. Pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan
- ii. Pengendalian pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara
- iii. Tempat perlindungan plasma nusfla dan keaneka ragaman hayati
- iv. Pengendalian tata air
- v. Saraba estetika kota.

Disamping fungsi-fungsi umum tersebut, RTH, khususnya dari berbagai jenis tanaman pengisi, secara rinci mempunyai multi fungsi anatara lain sebagai penghasil okseigen, bahan baku pangan, sandang, papan, bahan baku industri atau disebut sebagai fungsi ekologis melalui pemilih jenis dan sistem pengelolaannya (rencana, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengawasan / pengaturan) yang tepat dan baik. Maka tanaman atau kumpulannya secara rinci dapat berfungsi pula sebagai pengatur iklim mikro, penyerap dan penyerap polusi media udara, air dan tanah, jalur penggerakan satwa, penciri (maskot) daerah, pengontrol suara, pandangan, dan lain-lain.

### **3. Tujuan Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau**

Tujuan penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau menurut Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan yaitu :

- a. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air
- b. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antar lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat
- c. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

### **4. Manfaat Ruang Terbuka Hijau**

Pada dasarnya ruang terbuka hijau sangatlah penting diadakan di kawasan perkotaan. Karena seperti yang kita lihat dikawasan perkotaan sangat sedikit untuk dibentuknya ruang terbuka hijau. Banyak manfaat yang terjadi jika terbentuknya ruang terbuka hijau atau kota hijau itu sendiri dikawasan perkotaan. Hal itu terlihat Menurut Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan adalah :

- a. Manfaat langsung dalam pengertian cepat yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah)

- b. Manfaat tidak langsung berjangka panjang yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala aspek baik itu flora maupun fauna yang ada (keanekaragaman hayati).

#### **E. Tinjauan Tentang Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Mataram**

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031 pasal 4 yang menyatakan bahwa :

“Tujuan penataan ruang Kota adalah untuk mewujudkan Kota sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Jasa, Industri, serta Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal yang Didukung dengan Prasarana dan Sarana Perkotaan yang Seimbang dan Berwawasan Lingkungan”

Dengan demikian perda di atas telah jelas menyampaikan tujuan, pengaturan, dan strategi dari penataan ruang untuk mewujudkan efektifitas dari penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Mataram secara jangka panjang sampai tahun 2031, guna mensejahterakan dan menyeimbangkan pola hidup masyarakat kota Mataram.

Demi mewujudkan penyediaan Ruang Terbuka Hijau sebagai salah satu pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Kota Mataram mempunyai program dan kebijakan yang tertera pada pasal 30 perda No 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa :

1. Pengembangan kawasan ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
  - a. pengalokasian RTH minimal 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota yang terdiri dari 20 (dua puluh) persen RTH publik dan 10 (sepuluh) persen RTH privat dengan tutupan vegetasi; dan
  - b. pemilihan jenis vegetasi sesuai dengan fungsi dan jenis RTH yang dikembangkan.
2. RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikontribusi oleh:
  - a. RTH konservasi, terdiri dari hutan kota di Kelurahan Selagalas serta daerah tangkapan air di Kelurahan Selagalas, Kelurahan Jempong Baru, dan Kelurahan Ampenan Utara;
  - b. RTH lingkungan, terdiri dari taman kota di Kelurahan Kebon Sari, Kelurahan Pejarakan Karya, Kelurahan Karang Baru, Kelurahan Mataram Barat, taman lingkungan dan pekarangan, serta ruang terbuka hijau taman atap;
  - c. RTH jalur, terdiri dari jaringan jalan di sepanjang Jalan Udayana, Jalan Langko – Jalan Pejanggik, Jalan Arya Banjar Getas – Jalan Dr. Sujono, Jalan Sriwijaya – Jalan Majapahit, dan Jalan Jend. Ahmad Yani serta jalur jaringan listrik tegangan tinggi di Kecamatan Sekarbela; dan
  - d. RTH khusus, terdiri dari Tempat Pemakaman Umum (TPU), pekarangan perkantoran, kawasan penyangga seperti sempadan

pantai, sempadan sungai, pekarangan kawasan pendidikan, kawasan pariwisata alam, dan kawasan rekreasi hijau.

Dengan demikian proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan system hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun system ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang di keluhkan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Menurut peraturan menteri nomor 5 tahun 2008 ruang terbuka hijau (RTH) kawasan perkotaan adalah sebagai berikut :

Ruang kota terdiri dari Ruang terbangun dan Ruang terbuka. Ruang terbangun terdiri dari hunian adalah 40% dengan KDB adalah 80% dan non hunian adalah 20% dengan KDB 90%. Ruang Terbuka Hijau ( RTH) untuk hunian adalah 8% dan RTH non hunian 2% sehingga RTH prifat adalah 10%. Untuk Ruang terbuka terdiri dari taman adalah 12,5 dengan KDB 0%. Jalan adalah 20% dan lainnya 7,5% dengan KDB adalah 80%. Ruang Terbuka Hijau untuk taman 12,5% untuk jalan adalah 6% dan Ruang Terbuka Hijau untuk lainnya 1,5% sehingga Ruang Terbuka Hijau Publik adalah 20% maka standar Ruang Terbuka Hijau ( RTH) pada kawasan perkotaan adalah 30%.

#### **F. Kerangka Berfikir**

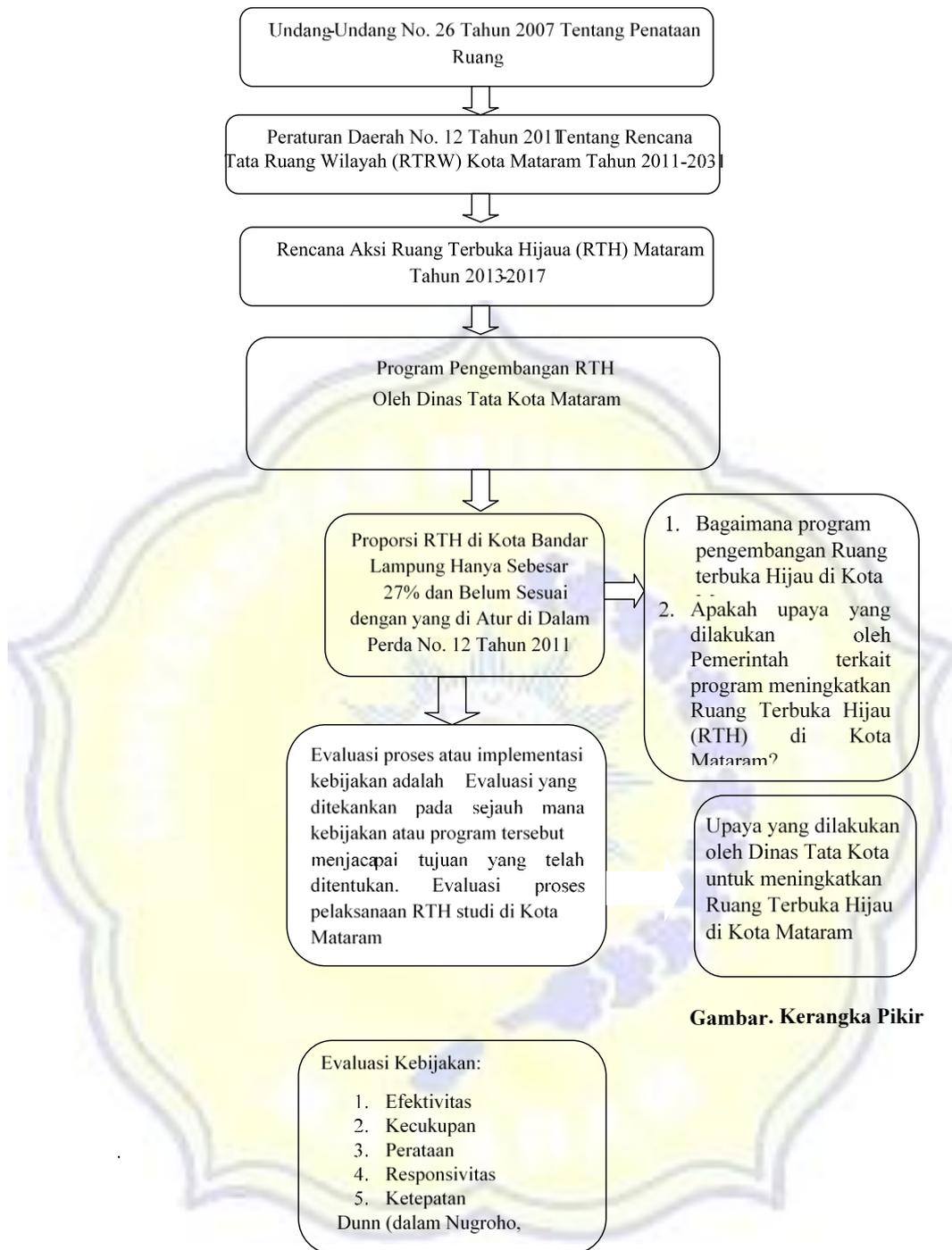
Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dimana dalam pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah

kota dan proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota dan ruang terbuka hijau privat 10% dari luas wilayah kota . Berdasarkan hal tersebut Kota Bandar Lampung mengeluarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Mataram yang di mana Perda ini merupakan turunan dari Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang di dalam perda tersebut menjelaskan pula terkait proporsi 30% dari luas wilayah kota. Proporsi 30% tersebut terbagi atas ruang terbuka hijau public sebesar 20% dan ruang terbuka hijau privat sebesar 10%.

Tetapi, pada realitanya Kota Mataram belum memenuhi proporsi yang telah ditetapkan dalam perda tersebut. Berdasarkan data yang peneliti temukan dari situs internet yang di unggah oleh Jayajog, dari hasil observasi dan wawancara yang di lakukan jayajok terkait Ruang Terbuka Hijau di daerah Mataram yang dilakukan pada Tahun 2019 menyatakan bahwa Ruang Terbuka Hijau di Kota Mataram baru mencapai 27% dan realita yang terjadi di Kota Mataram secara efektif atau di alih fungsikan contohnya luas RTH yang telah ditetapkan oleh Pemkod Mataram sebesar 1800 hektar, dan telah terpenuhi sebesar 1600 hektar tinggal sisanya 200 Hektar untuk memenuhi kewajiban dari RTH yang telah di tentukan, salah satunya RTH yang memanjang di kawasan ampenan telah di gunakan sebesar 9,7 hektas untuk pembangunan PLTGU Lombok peaker dan telah di janjikan akan digantikan dengan lahan yang sama di tempat lain. (radar Lombok.co.id 1 juli 2019)

Maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah atau Dinas Tata Kota terkait upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Pada penelitian ini peneliti akan menekankan pada evaluasi Proses atau implementasi kebijakan, sejauh mana kebijakan atau program tersebut mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam mengevaluasi proses atau implementasi perda terkait Ruang Terbuka Hijau di Kota Mataram maka dapat digunakan tipe evaluasi menurut Dun dalam Nugroho (2011:729) terdiri dari : 1. Efektivitas, 2. Efisiensi, 3. Kecukupan, 4. Perataan, 5. Responsivitas, dan 6. Ketepatan.





Gambar. Kerangka Pikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian dengan tipe deskriptif kualitatif. Moleong (2011:6) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Sedangkan Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2011:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Menurut Bungin (2005:36), penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi dan berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi. Kemudian mengangkat ke permukaan

karakter atau gambaran tentang kondisi, situasi atau pun variabel tersebut. Kaitannya dengan penelitian ini adalah bahwasanya penelitian ini menggunakan penelitian dengan tipe deskriptif kualitatif untuk menggambarkan proses serta implementasi terkait Ruang Terbuka Hijau di Kota Mataram.

## **B. Fokus Penelitian**

Untuk menciptakan penelitian yang terkonsentrasi, maka peneliti menetapkan fokus penelitian. Fokus penelitian dalam penelitian ini meliputi evaluasi proses atau implementasi kebijakan yaitu sejauh mana perda terkait Ruang Terbuka Hijau Kota Mataram tercapai, Fokus dalam penelitian ini yaitu hal-hal yang berkaitan dengan evaluasi perda Ruang Terbuka Hijau di Kota Mataram :

1. Mengevaluasi proses atau implementasi terkait kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Mataram dengan menggunakan tipe evaluasi yang dikemukakan oleh Dunn yang terdiri dari :
  - a. Efektivitas
  - b. Efisiensi
  - c. Kecukupan
  - d. Perataan
  - e. Responsifitas
  - f. Ketepatan
2. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam meningkatkan Ruang Terbuka Hijau di Kota Mataram.

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara purposive atau dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2014:218) purposive merupakan lokasi penelitian yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan diambil berdasarkan tujuan penelitian. Keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya perlu dipertimbangkan dalam penentuan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian bertempat di Kota Mataram berdasarkan pada adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Mataram. Penelitian dilakukan pada tanggal 25 Januari -29 Februari 2020.

### D. Subyek dan Informan Penelitian

Adapun subjek penelitian yang menjadi bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) yakni sebagai berikut:

Daftar Subjek dan Informan Penelitian

No.	Subjek Penelitian	Jumlah
1.	Kepala Bagian RTH Bidang Hutan Kota di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram	1 orang
2.	Bagian Tata Ruang Kota	1 orang
3	Masyarakat sekitar lokasi hutan kota	10 orang

Dalam penelitian ini, peneliti memilih Kepala Bagian RTH bidang hutan kota di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram dengan alasan mempunyai hubungan dengan rumusan masalah yang peneliti ambil, divisi yang spesifikasinya cocok seperti yang peneliti inginkan yaitu bidang RTH merangkap di dalamnya hutan kota yang menjadi subjek peneliti.

Subjek penelitian selanjutnya yaitu Bagian Tata Ruang Kota. Alasan peneliti memilih subjek penelitian tersebut dikarenakan peneliti mengetahui letak dan wilayah-wilayah Ruan Terbuka Hijau.

Subjek penelitian terakhir yaitu masyarakat sekitar lokasi hutan kota Mataram. Alasan peneliti memilih subjek penelitian tersebut adalah kedua subjek penelitian sebelumnya termasuk kedalam sudut pandang pemerintah atau yang ikut andil dalam membuat kebijakan, sedangkan subjek penelitian terakhir diambil dari sudut pandang masyarakat sebagai aktor yang langsung melaksanakan sebuah kebijakan tersebut sehingga terjadi subjek penelitian 2 (dua) arah antara pemerintah (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kota Mataram).

## **E. Sumber Data Penelitian**

### **1. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Data primer bersumber dari hasil survey langsung di lokasi penelitian. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung dari instansi-instansi yang terkait di Kota Mataram

seperti kantor Tata Ruang, bagian pemerintahan serta masyarakat setempat di kota Mataram.

## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang dapat diperoleh dari sumber bacaan, dokumen-dokumen serta berbagai sumber lainnya. Peneliti menggunakan data sekunder untuk memperoleh penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung.

## F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992) yang dapat dideskripsikan sebagai berikut:

### 1. Reduksi data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Cara reduksi data ialah: 1) Seleksi ketat data; 2) Ringkasan atau uraian singkat; dan 3) Menggolongkannya dalam pola yang lebih luas.

## 2. Penyajian data

Kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun bentuk penyajian data kualitatif yaitu:

1) Teks naratif, dimana berisikan catatan lapangan; 2) Matriks, grafik, jaringan dan bagan.

## 3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan peneliti selama berada di lapangan. Dari mulai pengumpulan data, penjelasan-penjelasan, alur sebab akibat, dan proposisi. Mula-mula belum jelas namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan lebih kokoh.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam membuat dan menyusun penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik analisis data kualitatif sesuai dengan kebutuhan penelitian dengan tiga proses yakni pertama, reduksi data dimana peneliti memilah-milih data yang layak dan sesuai untuk dimasukkan kedalam penelitian secara ketat dan teliti, kedua, penyajian data, dalam proses ini peneliti menyiapkan data sebanyak-banyaknya yang sekiranya dibutuhkan dan terintegrasi dengan judul penelitian dan ketiga, penarikan kesimpulan, dimana bukan saja hanya ada dalam BAB V (Penutup) tetapi juga peneliti harus sudah menyimpulkan apa saja materi yang akan dimasukkan, serta sudah dapat memastikan arah penelitian ini akan seperti apa.

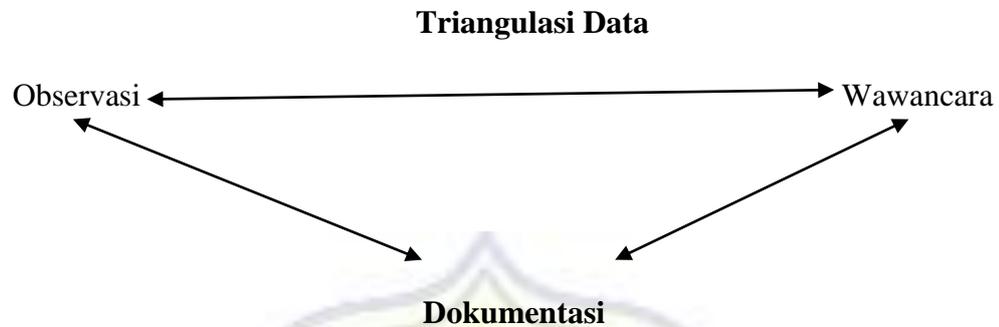
## **G. Keabsahan Data**

Hasil penelitian kualitatif sering diragukan karena dianggap tidak memenuhi syarat validitas dan reabilitas, oleh sebab itu ada cara-cara memperoleh tingkat kepercayaan yang dapat digunakan untuk memenuhi kriteria kredibilitas. Menurut Lincoln dan Guba (Moleong 2001:178) untuk memeriksa keabsahan data pada penelitian kualitatif antara lain digunakan taraf kepercayaan data credibility. Teknik yang digunakan untuk melacak credibility dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandung terhadap data itu (Moleong, 2001:178).

Teknik triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data, selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut (Sugiono, 2009:241):

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
2. Membandingkan hasil wawancara yang sama dengan waktu yang berbeda
3. Membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan pendapat dan pandangan orang seperti pembimbing dan kolega.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan

Berikut gambaran mengenai triangulasi dengan teknik pengumpulan data:



Melalui tahap-tahap tersebut peneliti memperoleh data secara lengkap mengenai “Evaluasi Program Pengembangan ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Mataram” sehingga peneliti dapat membuktikan keabsahan data atau informan yang telah diperoleh melalui langkah-langkah pengumpulan data di lapangan.

#### **H. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sutopo (2006:9) mengatakan teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif secara umum dikelompokkan ke dalam dua jenis cara, yaitu teknik yang bersifat interaktif dan non-interaktif. Metode interaktif meliputi interview dan observasi berperan serta, sedangkan Metode non-interaktif meliputi observasi tak berperan serta, teknik kuesioner, mencatat dokumen, dan partisipasi tidak berperan. Berbeda dengan Sutopo, Sugiyono (2008,63) ada empat macam teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan atau triangulasi.

Arikunto (2002:136) berpendapat bahwa metode penelitian adalah berbagai cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data

penelitiannya. Cara yang dimaksud adalah wawancara, dan studi dokumentasi. Berdasarkan pendapat-pendapat diatas peneliti menyimpulkan ada empat cara atau teknik pengumpulan data yang dilakukan yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### 1. Teknik Observasi

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa dan waktu. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Adapun observasi yang dilakukan sesuai dengan subjek dan lokasi penelitian yang telah dipaparkan diatas berikut.

#### 2. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan alat rechecking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (in-depth interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan

informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Sutopo, 2006:72). Berdasarkan pendapat tersebut dalam melakukan penelitian, peneliti bertatap muka langsung dengan para narasumber dengan diikuti beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu.

Interview adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari interview adalah kontak langsung dengan tatap muka (face to face relationship) antara peneliti dengan sumber informasi (Sutopo, 2006:74). Interview dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi yang tidak mungkin diperoleh lewat observasi (Alwasilah, 2012:110). Berdasarkan pendapat tersebut wawancara akan lebih dikhususkan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung sebagai dinas resmi Kota Bandung yang mengurus masalah lingkungan.

### 3. Teknik Dokumentasi

Nasution (2003:86) mendeskripsikan bahwa data dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia atau human resources, melalui observasi, wawancara, serta kegiatan-kegiatan lain yang dirasa peneliti layak didokumentasikan akan tetapi ada pula sumber bukan manusia, non human resources, diantaranya dokumen, foto dan bahan statistik. Berdasarkan pendapat tersebut bahwasannya

peneliti sebagai key instrument melakukan kegiatankegiatan tersebut di lapangan untuk keakuratan dan kelengkapan data.

Adapun pendapat lain mengenai studi dokumen yang dilakukan oleh para peneliti kualitatif, posisinya dapat dipandang sebagai narasumber. Menurut Danial (2009:79) mengatakan bahwa : Studi Dokumentasi adalah mengumpulkan sejumlah dokumen yang diperlukan sebagai bahan data informasi sesuai dengan masalah penelitian, seperti peta, data statistik, jumlah dan nama pegawai, data siswa, data penduduk, grafik, gambar, surat-surat, foto, akta, dsb.

Berdasarkan pendapat diatas bahwa dokumentasi memang sangat diperlukan untuk menunjang penelitian ini dan dengan dokumentasi inilah dapat menggambarkan keadaan yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil dari data-data dokumentasi. Adapun dokumen yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yakni data-data terkait RTH dan beberapa foto-foto.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Deskripsi Wilayah Kota Mataram**

Kota Mataram dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram. Kota Mataram, selain merupakan Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat juga merupakan pusat penyelenggaraan Pemerintahan, Pendidikan dan Perekonomian Barang dan Jasa dengan pintu masuk sebelah barat terdapat Bandara Selaparang, sebelah selatan melalui Pelabuhan Lembar yang datang dari Padang Bai (Bali) dan sebelah Timur Pelabuhan Kayangan, Labuan Lombok yang datang dari pulau Sumbawa. Saat ini, Kota Mataram sedang dikembangkan untuk menjadi kota pariwisata. Syarat mendasar sebuah kota pariwisata harus mampu menunjukkan karakter lingkungan yang sehat. Pengembangan pariwisata saat ini sangat penting artinya bagi Kota Mataram karena akan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli daerah serta dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan bagi masyarakat.

Keberadaan kota Mataram sebagai Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki posisi strategis sebagai pintu masuk utama